

## ANALISIS PERUBAHAN SISTEM PENGANGGARAN DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA PADA KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh:

**Resti Hanatasia Waworuntu<sup>1</sup>**  
**Treesje Runtu<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email : [1restiwaworuntu@gmail.com](mailto:1restiwaworuntu@gmail.com)  
[2truntu@gmail.com](mailto:2truntu@gmail.com)

Perubahan sistem penganggaran di Indonesia ke sistem penganggaran yang berbasis kinerja merupakan faktor penting untuk mendorong dan meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam mendukung terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat utama dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Penganggaran berbasis kinerja berorientasi bagaimana para pemimpin mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perubahan sistem penganggaran di Indonesia memberikan pengaruh pada Kinerja Instansi Pemerintah khususnya pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan data kuantitatif dan kualitatif serta objek penelitian adalah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dengan sumber data adalah LAKIP selama periode 3 tahun terakhir yakni tahun 2011-2013. Hasil Penelitian menunjukkan perubahan sistem penganggaran di Indonesia dari sistem penganggaran *traditional based budgeting system* ke *performance based budgeting system* telah memberikan pengaruh pada peningkatan capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara selama periode 3 tahun terakhir, sejak sistem penganggaran berbasis kinerja diaplikasikan di Instansi tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya angka presentase pencapaian target yang berkisar 85% sampai dengan 100% dengan kategori capaian kinerja Sangat Berhasil (SB). Oleh karena itu, sistem ini sebaiknya tetap konsisten diterapkan pada semua instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara.

**Kata kunci:** *sistem penganggaran, anggaran berbasis kinerja*

### ABSTRACT

*The change of the budgeting system in Indonesia to a performance-based budgeting system is an important factor to encourage and improve the performance of government agencies and to reach the aims of nation. This research aims to find out how the change in budgeting system in Indonesia influence the performance of government agencies at all and especially at North Sulawesi Provincial Inspectorates. Methods of analysis used are descriptive methods with quantitative and qualitative data as well as the object of research is the Inspectorate on North Sulawesi province with the data source is LAKIP during the period of the last 3 years the years 2011-2013. The results showed changes in the budgeting system of budgeting system Indonesia Traditional based budgeting system to Performance based budgeting system turned out to have given the influence on improving product performance of Inspectorates North Sulawesi province in 3 years period, since performance based budgeting system applied in this government agency. It was showed by the high number of target attainment percentage ranging 85% up to 100% with the category of achievement very successful performance. Therefore, this system should remain consistently applied to all government agencies in the province of North Sulawesi.*

**Keywords:** *budgeting, budget-based system performance*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggung jawabkan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi dan misi serta strategi dari instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran/target dari kinerja yang telah ditetapkan dan diukur menggunakan indikator (*outcome*) yaitu ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan suatu program atau indikator keluaran (*output*) yaitu ukuran barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dari kebijakan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya perubahan.

Sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting systems*) saat ini telah menjadi penganggaran yang telah dirubah dan digunakan. Sistem ini dianggap lebih maju daripada sistem anggaran berbasis tradisional. Penganggaran berbasis kinerja berorientasi bagaimana para pemimpin mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Dalam sistem ini, para pemimpin tidak hanya mendasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di sistem penganggaran tradisional, tetapi anggaran juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur dibidang pengawasan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah melalui pendidikan teknis pengawasan yang harus dilakukan secara sistematis, agar dapat meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan, keahlian, penguasaan aturan, pengalaman dan tanggung jawab.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan badan pengawasan daerah yang secara langsung terkena dampak dari terjadinya perubahan sistem penganggaran tersebut, sehingga itulah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai perubahan sistem penganggaran yang terjadi serta pengaruhnya pada kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan sistem penganggaran dari sistem penganggaran tradisional (*traditional based budgeting system*) ke sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting system*) yang telah ditetapkan sejak TA. 2007 di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Anggaran

Munandar (2007:1) menyatakan anggaran sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Sedangkan, anggaran menurut Mardiasmo (2009:61) merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

### Fungsi Anggaran

Mardiasmo (2009: 63-66) menguraikan beberapa fungsi anggaran sektor publik, sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)  
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan – pemborosan pengeluaran.
3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)  
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)  
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas – prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination And Communication Tool*)  
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)  
Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budgetholder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)  
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai Alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*)  
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/ DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

### Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Nordiawan dan Hertianti (2010:71-72) mengklasifikasi anggaran sektor publik, menjadi berikut:

1. Anggaran Operasional dan Anggaran Modal
2. Anggaran Berdasarkan Pengesahan
3. Anggaran Dana Umum vs Anggaran Dana Khusus
4. Anggaran Tetap vs Anggaran Fleksibel
5. Anggaran Eksekutif vs Anggaran Legislatif

### Perubahan Penganggaran di Indonesia

Metamorfosis penganggaran adalah perubahan dari *Line Item Budgeting* atau tradisional memakai cara *incremental* dalam pengalokasian anggarannya menjadi penganggaran berdasarkan kinerja. Perubahan inilah yang paling mendasar berupa perubahan pola pikir. Semula penyusunan anggaran masih berkuat pada bagaimana merinci program dalam kegiatan dan biayanya sehingga terbentuk alokasi anggaran secara menyeluruh atas program. Sistem penganggaran yang baru memberi fokus pada hasil, bagaimanapun cara melaksanakan kegiatan tersebut. Pola pikir seperti inilah yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

### Dasar Hukum Penyusunan Anggaran

1. Undang – Undang
  - a. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  - b. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  - c. UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - d. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - e. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  - f. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  - g. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah
  - a. PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  - b. PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Dan Keputusan Presiden
  - a. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  - b. Perpres Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  - c. Keppres Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  - d. Perpres Nomor 105 Tahun 2007 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran 2008
4. Peraturan Menteri Keuangan
  - a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 20 /PB/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran
  - b. Permenkeu Nomor 51 /PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
  - c. Permenkeu Nomor 52 /PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri
  - a. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - b. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

### **Perkembangan Sistem Penganggaran di Indonesia**

Penerapan di negara kita, sebelum sistem Anggaran berbasis kinerja dilaksanakan, ada sistem penganggaran lain yang pernah digunakan yaitu sistem anggaran berdasarkan tradisional atau item *line budget*. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisis rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, tetapi lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dan tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolak ukur keberhasilannya hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja, namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistem anggaran berbasis kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan yang diberikan.

Sistem anggaran berbasis kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri merupakan perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja (seperti yang terjadi pada sistem anggaran berbasis tradisional), tetapi juga didasarkan pada tujuan/ rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

## **Kinerja**

Mahsun (2012:25) mendefinisikan Kinerja (*performance*) sebagai gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

## **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Nordiawan dan Hertianti (2010:157-158) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan.

## **Hubungan Perubahan Sistem Penganggaran dengan Kinerja Sektor Publik**

Pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

## **Penelitian Terdahulu**

Lubis (2009) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberlakuan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian oleh Lubis dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yakni melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem penganggaran terhadap kinerja, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti di atas hanya meneliti pada kondisi statis dimana diterapkannya sebuah sistem penganggaran, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada saat terjadi perubahan sistem penganggaran.

Nurcahyani (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh langsung terhadap kinerja manajerial. Penelitian oleh Mawei dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yakni penelitian ini juga melakukan analisis tentang pengaruh yang terjadi pada kinerja karyawan, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti di atas melihat pengaruh yang diberikan oleh suatu fase penganggaran, sedangkan peneliti melihat pengaruh yang diberikan oleh karena suatu perubahan yang terjadi pada sistem penganggaran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sugiyono (2013:13) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci serta pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil tempat di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Jl. 17 Agustus Manado. Waktu penelitian dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2014.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan permohonan izin penelitian pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
2. Mengumpulkan data yang diperlukan
3. Melakukan proses olah data dan analisis data
4. Membuat hasil dan pembahasan penelitian
5. Membuat kesimpulan dan saran

## **Metode Pengumpulan data**

### **Jenis Data**

Kuncoro (2009:145) mengelompokkan data kedalam dua jenis: data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif dan Kualitatif yang berupa LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara selama 3 tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan 2013.

### **Sumber Data**

Indriantoro dan Supomo (2012:146-147) membagi data berdasarkan sumbernya menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara, dan
2. Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Sumber data yang ada dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan di tempat penelitian.

### **Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Survei adalah kegiatan awal yang peneliti lakukan untuk meneliti permasalahan yang sedang di hadapi oleh perusahaan seperti sejarah dan kondisi perusahaan pada saat ini. Dalam hal ini peneliti memilih Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sebagai objek penelitian. Permasalahan yang dihadapi oleh Instansi kemudian diangkat sebagai judul penelitian dengan menentukan rumusan masalah penelitian menjadi lebih fokus.
2. Dokumentasi yang didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui LAKIP, buku-buku dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada seperti sejarah Instansi dan laporan yang disajikan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

### **Metode Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan pencapaian kinerja kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara selama periode 3 tahun terakhir dari tahun 2011 – 2013.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Rencana Kinerja Tahun 2011**

Sasaran dalam Tahun 2011 Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yaitu dengan melakukan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - a) Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - b) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - c) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya
  - d) Tindak lanjut temuan hasil pengawasan
  - e) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

### Pengukuran Capaian Kinerja 2011

Analisis capaian kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011 menunjuk hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2011**

No.	Sasaran	Jmlh IK	SB	B	CB	TB
1.	Terwujudnya aparatur pengawas yang kompeten dan profesional	1	√			
2.	Terlaksananya pengawasan atas kinerja dan ketaatan aparatur pemerintah	4	√			
3.	Terwujudnya sinergitas pengawasan dengan institusi terkait	1	√			

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011

### Penganggaran Tahun 2011

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan kegiatan maka untuk Tahun Anggaran 2011 tersedia dana yang bersumber dari :

#### 1. APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja, maka untuk tahun anggaran 2011 tersedia dana dalam APBD yang dituangkan dalam : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 Tanggal 2 September 2011. Nilai anggaran yang tertuang dalam DPA APBDP Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 18.278.514.500,- yang terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung Rp. 10.328.514.500,-
- b. Belanja langsung Rp. 7.950.000.000,- terdiri dari :
  - 1) Belanja Pegawai Rp. 526.260.000,-
  - 2) Belanja Barang/Jasa Rp. 6.005.435.000,-
  - 3) Belanja Modal Rp. 968.305.000,-

#### 2. APBN / PHLN

Tidak ada Dana APBN / PHLN dalam Tahun Anggaran 2011.

### Rencana Kinerja Tahun 2012

Sasaran dalam Tahun 2012 Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara melakukan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - a) Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - b) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - c) Tindak lanjut temuan hasil pengawasan

### Pengukuran Capaian Kinerja 2012

Analisis capaian kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 menunjuk hasil sebagai berikut :

**Tabel 2. Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2012**

No.	Sasaran	Jmlh IK	SB	B	CB	TB
1.	Terwujudnya aparatur pengawas yang kompeten dan profesional	1	√			
2.	Terselenggaranya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang Baik	1	√			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	√			
4.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	√			

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012

### Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan kegiatan maka untuk Tahun Anggaran 2011 tersedia dana yang bersumber dari :

#### 1. APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja, maka untuk tahun anggaran 2012 tersedia dana dalam APBD yang dituangkan dalam :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 Tanggal 30 Desember 2011;
- b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor : 1.20 05 01 00 00 5 1 Tanggal 18 September 2012, nilai anggaran yang tertuang dalam DPA APBDP Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sebesar:

Sebelum perubahan Rp. 19.858.361.000,-

Setelah Perubahan Rp. 18.961.964.000,- yang terdiri dari :

Belanja tidak langsung Rp. 11.037.370.000,-  
 setelah perubahan Rp. 9.540.973.000,-  
 Belanja langsung Rp. 8.820.991.000,-

Setelah perubahan Rp. 9.420.991.000,- terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Rp. 563.868.000,-
- b. Belanja Barang/Jasa Rp. 7.323.058.280,-
- c. Belanja Modal Rp. 1.534.064.720,-

Nilai anggaran yang tertuang dalam DPA APBDP Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 18.278.514.500,- yang terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung Rp. 10.328.514.500,-
- b. Belanja langsung Rp. 7.950.000.000,- terdiri dari :
  - 1) Belanja Pegawai Rp. 526.260.000,-
  - 2) Belanja Barang/Jasa Rp. 6.005.435.000,-
  - 3) Belanja Modal Rp. 968.305.000,-



## 2. APBN / PHLN

Tidak ada Dana APBN / PHLN dalam Tahun Anggaran 2012.

**Rencana Kinerja Tahun 2013**

Tahun 2013 Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara melakukan program dan kegiatan untuk melaksanakan sasaran sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - a) Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - b) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - c) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya
  - d) Tindak lanjut temuan hasil pengawasan
  - e) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

**Pengukuran Capaian Kinerja 2013**

Analisis capaian kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 menunjuk hasil sebagai berikut :

**Tabel 3. Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2013**

No.	Sasaran	Jmlh IK	SB	B	CB	TB
1.	Terselenggaranya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang Baik	1	√			
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2	√			
3.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	√			

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

**Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013**

Tahun Anggaran 2011 dalam melaksanakan kegiatan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah tersedia dana yang bersumber dari :

## 1. APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja, maka untuk tahun anggaran 2013 tersedia dana dalam APBD yang dituangkan dalam:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 Tanggal 31 Desember 2012;
- b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor : 1.20 05 01 00 00 5 1, nilai anggaran yang tertuang dalam DPA APBDP Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 4. Akuntabilitas Keuangan Kantor Inspektorat Sulawesi Utara Tahun 2013**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Sebelum Perubahan (Rp.)</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp.)</b>
Belanja Tidak Langsung	10.080.586.000,-	-
Belanja Langsung :		
- Pegawai	949.796.000,-	1.035.096.000,-
- Barang dan Jasa	8.486.695.000,-	10.102.395.000,-
- Modal	749.500.000,-	1.048.500.000,-
Jumlah Belanja Langsung	10.185.991.000,-	12.185.991.000,-
Total BTL+BL	20.266.577.000,-	22.266.577.000,-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

## 2. APBN / PHLN

Tidak ada Dana APBN / PHLN dalam Tahun Anggaran 2012.

## Pembahasan

### Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja maka pada tahun 2011 Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan presentase pencapaian target berkisar 85% sampai dengan 100% dengan kategori capaian kinerja Sangat Berhasil (SB). Sementara itu pada tahun 2012 sasaran strategis yang berhasil dicapai adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan presentase pencapaian target berkisar 85 % sampai dengan 100 %, sehingga kategori capaian kinerja juga berada pada kategori Sangat Berhasil (SB). Pada tahun 2013 Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara merumuskan 3 (tiga) sasaran strategi yang ingin dicapai yaitu :

1. Terselenggaranya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Analisis capaian kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategi yang di laksanakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara maka rata-rata presentase pencapaian target berkisar antara 85% sampai dengan 100%. Sehingga hasil tersebut berada pada kategori capaian kinerja Sangat Berhasil (SB). Dengan demikian berdasarkan Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara selama periode 3 tahun terakhir sejak diberlakukannya Sistem Anggaran yang Berbasis Kinerja, maka hasilnya telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

### Anggaran Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, guna mencapai kinerja yang telah dicapai selama 3 tahun terakhir, maka Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara senantiasa memerlukan dana pada setiap tahun anggaran yang bersumber dari APBD. Pada tahun 2011 Nilai Anggaran yang tertuang pada DPA APBDP Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dengan tingkat capaian keuangan atau tingkat capaian realisasi anggaran sebesar rata-rata 87,24% untuk setiap sasaran strategi dari 3 (tiga) sasaran strategi yang telah dicapai pada tahun anggaran 2011. Pada tahun 2012 Nilai Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Perubahan (APBDP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dengan tingkat capaian keuangan atau tingkat capaian realisasi anggaran sebesar rata-rata 82,39% untuk setiap sasaran strategi dari 4 (empat) sasaran strategi yang telah dicapai pada tahun anggaran 2012. Kemudian pada tahun 2013 Nilai Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Perubahan (APBDP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dengan tingkat capaian keuangan atau tingkat capaian realisasi anggaran sebesar rata-rata 92,16% untuk setiap sasaran strategi dari 3 (tiga) sasaran strategi yang telah dicapai pada tahun anggaran 2013. Berdasarkan perkembangan Nilai Anggaran yang diperuntukkan bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara maka nampaknya selama periode 3 tahun terakhir terjadi peningkatan Nilai Anggaran dimana pada tahun 2011, tahun 2012 atau mengalami perubahan sebesar 3,74% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2013 Nilai Anggaran meningkat atau mengalami pertumbuhan sebesar 17,43% dari tahun sebelumnya.

Tingkat capaian keuangan atau tingkat capaian realisasi anggaran nampaknya terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2011 mencapai 87,24% untuk setiap sasaran strategi yang berhasil dicapai, kemudian pada tahun 2012 mencapai 82,39% dan pada tahun 2013 mencapai 92,16% untuk setiap sasaran strategi yang berhasil dicapai oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian Lubis (2009) yang menyatakan bahwa sistem penganggaran memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja karyawan tersebut turut di dukung oleh penulis dimana pengaruh perubahan sistem penganggaran yang terjadi dinilai positif, dilihat dari tingkat pencapaian target sasaran strategi yang berkisar antara 85% - 100% dengan kategori Sangat Berhasil.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Perubahan sistem penganggaran di Indonesia ke sistem penganggaran yang berbasis kinerja ternyata telah memberikan pengaruh terhadap Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, dimana selama periode 3 tahun terakhir rata-rata setiap tahunnya presentase pencapaian target sasaran strategi yang dicapai oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara adalah berkisar 85% sampai dengan 100% dengan kategori Capaian Kinerja Sangat Berhasil (SB), meski tingkat capaian realisasi anggaran mengalami fluktuasi namun nilai anggaran yang diterima oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara senantiasa mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2013.

### Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya Sistem Penganggaran yang Berbasis Kinerja tetap diterapkan pada semua Instansi Pemerintah dan khususnya di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
2. Besaran presentase Pencapaian Target Sasaran Strategi senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan agar kategori Capaian Kinerja selalu berada pada kondisi Sangat Berhasil

## DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 1. BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*, Edisi ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 2011, 2012, 2013. Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- Lubis, Hijrani. 2009. Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9284/1/10E00096.pdf>. Tanggal Akses: 06 Juli 2014. Hal.i.
- Mahsun. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi 3. Penerbit PT. Salemba 4, Jakarta.
- Munandar, M. 2007. *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi kedua. BPFE, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. Hertianti Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Nurcahyani, Kunwaviyah. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. [http://eprints.undip.ac.id/23124/1/SKRIPSI\\_FULL\\_TEXT.PDF](http://eprints.undip.ac.id/23124/1/SKRIPSI_FULL_TEXT.PDF). Tanggal Akses: 06 Juli 2014. Hal. i.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Alfabeta, Bandung.